

DAFTAR LITERATUR

- Anwar. 2017. *Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Andriani, R. 2015. *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs Terhadap Peranan DPRD Se-Propinsi Bengkulu*, Interest, Bengkulu.
- Alamsyah. 2017. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis, Yogyakarta.
- Amin, Widjaja Tunggal. 2018. *Dasar–dasar Customer Relationship Management (CRM)*. Jakarta: Harvindo.
- Corynata, Isma. 2017. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin.
- Devi, Nirmala. 2010. *Sektor Publik Pemerintah. Media Akuntansi*. Edisi 26. BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah.
- Erma, Noviaangsih. (2010). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
- Ghozali, Imam. 2015. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis Studi Empiris Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Akuntansi Keuangan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Ghozali, Imam, dan Nazir, Mohamad. 2017. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* Studi empiris di Provinsi Papua. Tesis Studi Empiris di kota Semarang.
- Helmayunita, Nayang (2018). “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating.
- Halim, Abdul. 2017. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi Kesatu. Jogjakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

- Nasirwan. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pendidikan/Pelatihan Sebagai Variabel Moderating*.
- Novatianti, R., Ait dan Nurmalita Lestari. 2010. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*. Bandung.
- Pangesti, Isa. 2013. *Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating*. Accounting Analysis Journal AAJ 1(3) 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Pramono, Agus H. 2012. *Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2 Di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang.
- Putro, Andik Cahyo. 2013. *Aplikasi Pengelolaan Publikasi Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rima, Rosseptalia. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Ritzer, George. 2012. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Teori Aksi (Grand Teori)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosseptalia, Rima. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Tesis U11: Yogyakarta.
- Rima, Rosseptalia. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Rubin, Irene. 2016. *Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s*. Jurnal Public Budgeting & Finance, Summer, hal. 112-132.
- Rustiyarningsih, Sri. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. Tesis Studi Empiris Kalimantan Barat.
- Rubin, I. 2016. *Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s*, Jurnal Public Budgeting & Finance, Summer.

- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Bandung: Citra Umbara.
- _____. 2001. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Bandung : Citra Umbara.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban anggaran, Bandung: Citra Umbara.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No.108 tahun 1999 Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Bandung: Citra Umbara.
- Sjamsudin, S. 2017. Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten, *Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial*, Malang.
- Sopannah. 2015. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Makalah Symposium Nasional Akuntansi V, Semarang
- Saputro. 2012. *Pemanfaatan Hasil Mengelola Pelatihan Partisipasi. Bandung: Disampaikan dalam Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah*. BAPPEDA Bantu. Yogyakarta.
- Saputro, Aditya Dibyo. 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Di DPRD Kabupaten Boyolali). Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Setiyawan, Hari Eka. 2016. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Tesis Studi Empiris Di Kabupaten Bungo
- Sopannah. 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, dalam Proceeding Simposium Nasional akuntansi VI, Membangun Citra Akuntan melalui Peningkatan Kualitas Pengetahuan, Pendidikan dan Etika Bisnis, Surabaya, 16-17
- Sopannah dan Wahyudi. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*.
- Sudiarta, I Dewa Gede. 2014. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai*

Variabel Pemoderating. Ganesha Singaraja, Indonesia.

Sukoco, Manik. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis Studi Empiris Kota Malang.

Syaiful. 2019. *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan akuntansi*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Utama, Maulana Hardia. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi.

Yudono, Bambang. 2012. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Wahab, Abdul Solichin. 2018. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Werimon, Simson. 2015. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* Studi empiris di Provinsi Papua. Universitas Diponegoro, Semarang.

Wungow, J., F. 2016. *Pengaruh Tingkat, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, 7(2), hal 174-188

Yesi, dkk. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi*. Yudoyono, Bambang.2002. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.